

PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KECAMATAN SILIMAKUTA**¹Sri Andika Sirait, ²Ruminta Lumban Gaol, ³Poltak Theodorus Parhusip**

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email : sri.andika8008@gmail.com ; rumintalumbangaol843@gmail.com ;ikoparhusip17@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada kecamatan Silimakuta. Penelitian ini menggunakan data primer sebanyak 60 orang dari aparat pemerintah desa Sinar baru dan Purba Sinombah dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 22 dan pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan tingkat signifikansi sebesar 5 %. Dari hasil pengujian menggunakan SPSS diketahui bahwa, hasil pengujian hipotesis dengan uji F (simultan) menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, hal ini diperoleh dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $16.680 > 3.156$ dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel penerapan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, hal ini diperoleh dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5.106 > 1.672$ dan nilai signifikansi $0.002 < 0.05$, yang artinya jika diterapkannya prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan dan akan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah desa, maka kinerja pengelolaan keuangan desa akan meningkat menjadi lebih baik. Variabel penerapan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, hal ini diperoleh dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.394 > 1.672$ dan nilai signifikansi $0.020 < 0.05$, yang artinya jika diterapkannya prinsip akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa, maka kinerja pengelolaan keuangan desa akan meningkat menjadi lebih baik.

Kata Kunci : Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Besarnya Dana Desa untuk setiap desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola keuangan desa harus didasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif

antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep akuntabilitas didasarkan pada individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Konsep *good governance* ini digunakan sebagai kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak di topang oleh prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Adanya penerapan *good governance* dapat mengembangkan keuangan tingkat desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana di tingkat desa. Dalam rangka pengelolaan anggaran belanja, lebih bertanggung jawab dan terealisasi dengan baik maka diperlukan penerapan *good governance* dimana untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa. Pemberian dana ke desa yang begitu besar, maka pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa. Dibalik besarnya dana yang dikelola desa dan harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, terdapat kekhawatiran yang tidak kalah besarnya. Apabila dalam pengelolaan dana desa tersebut pemerintah desa tidak disertai transparansi dan akuntabilitas maka akan berpotensi terjadinya penyimpangan.

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak mendapatkan informasi keuangan pemerintah. Keterbukaan informasi ini merupakan salah satu perwujudan transparansi. Selanjutnya, transparansi akan membantu masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik terkait pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu, adanya prinsip transparansi tersebut kemudian menjadi acuan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 ada 3 indikator dalam pengukuran kinerja yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Indikator tersebut dapat dijabarkan dalam konsep pengukuran kinerja yang disebut *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Tabel 1. Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Pemerintahan Desa Sinar Baru dan Purba Sinombah Kecamatan Silimakuta Tahun 2019 – 2021

Nama Desa	Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Lebih Kurang
Sinar Baru	2019	Rp 759.051.000	Rp 738.783.791	Rp 20.267.209
	2020	Rp 743.746.000	Rp 756.098.300	(Rp 12.352.300)
	2021	Rp 742.196.000	Rp 707.296.275	Rp 34.899.725
Purba	2019	Rp 746.812.000	Rp 642.285.062	Rp 104.526.938



Sinombah	2020	Rp 734.140.000	Rp 679.513.179	Rp 54.626.821
	2021	Rp 729.236.000	Rp 683.656.421	Rp 45.579.579

Sumber : Kantor Kepala Desa Sinar Baru dan Purba Sinombah

Dari tabel 1. diatas menunjukkan dari tahun 2019- 2021 pada desa Sinar Baru dan Purba Sinombah ternyata setiap tahunnya memiliki sisa anggaran belanja yang cukup besar. Terutama di tahun 2019 terdapat sisa sebesar Rp. 104.526.938. Hal ini sudah menjadi fenomena didalam yang namanya anggaran desa. Aparat pemerintah desa masih memiliki keterbatasan baik dari segi pemahaman peraturan pemerintah dan juga pemahaman kemampuan dalam hal mengelola anggaran dana desa. Kinerja aparatur pemerintah desa pada penerapan *good governance* dalam pelaksanaan program kegiatan alokasi anggaran desa masih kurang optimal. Kurangnya komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat dan kualitas pelayanan yang masih rendah serta prinsip transparansi yang belum sepenuhnya dilaksanakan terkait belum ada informasi mengenai laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang di informasikan kepada masyarakat, ini mengakibatkan indikator produktivitasnya masih banyak program serta pelayanan yang tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran belanja desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan beberapa penelitian sebelumnya peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kecamatan Silimakuta”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa .

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

3. Asas –asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola dengan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin Anggaran

4. Good Governance

Menurut Sedarmayanti (2012: 12), merumuskan arti *good governance* yaitu pemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

5. Transparansi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2009 :18), Mewajibkan adanya suatu informasi yang diberikan kepada semua pihak secara terbuka, tepat waktu, serta jelas atas semua tindakan dan kewajiban yang diambil oleh pemerintah.

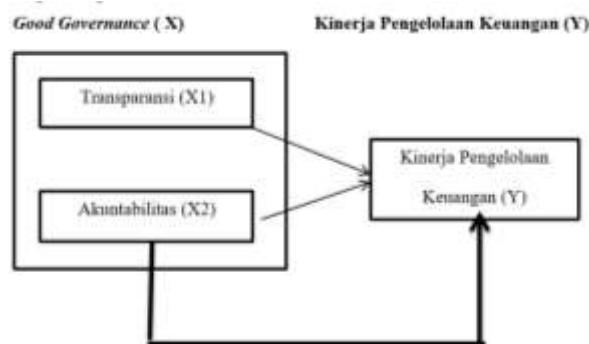
6. Akuntabilitas

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2009: 18), Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan serta fungsi-fungsi yang dijalankan pemerintah terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

7. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan juga bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan telaah teoritis, hasil-hasil penelitian serta kerangka berpikir maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

- H1 : Penerapan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Silimakuta.
- H2 : Penerapan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Silimakuta.
- H3 : Penerapan *good governance* yang terdiri dari transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Silimakuta.

METODE PENELITIAN

Operasional Variabel

Variabel penelitian	Sub variabel	Indikator	Skala
<i>Good Governance</i> (X)	Transparansi (X1)	1. Bentuk perencanaan dan hasil kegiatan disepakati melalui musyawarah 2. Data dan informasi jelas, akurat dan tepat waktu 3. Setiap informasi publik harus bersifat terbuka	Likert

Variabel penelitian	Sub variabel	Indikator	Skala
		4. Setiap informasi publik harus mudah diakses	
	Akuntabilitas (X ₂)	1. Penggunaan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan 2. Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku 3. Pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil 4. Membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial	Likert
Kinerja pengelolaan keuangan (Y)	Ekonomis	1. Jumlah belanja yang dianggarkan menjadi batasan tertinggi pengeluaran belanja 2. Pengelolaan keuangan secara ekonomis	Likert
	Efisien	1. Penggunaan keuangan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. . 2. Keuangan dikelola secara efisien	Likert
	Efektivitas	1. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas penggunaan keuangan 2. Ketepatan dalam penggunaan keuangan dan Pengelolaan keuangan secara efektif	Likert

Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner diberikan kepada aparatur pemerintah di desa Sinar Baru dan Purba Sinombah kecamatan Silimakuta. Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah skala likert.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu model regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen memiliki hubungan sebab akibat atau hubungan fungsional.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Variabel Penelitian

1.1 Variabel Transparansi (X₁)

Dalam mendeskripsikan variabel transparansi maka dapat dilihat pada frekuensi hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan atau indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi pada pemerintahan desa Sinar Baru dan Purba Sinombah kecamatan Silimakuta.

Tanggapan	Skor	X _{1.1}	X _{1.2}	X _{1.3}	X _{1.4}
Sangat tidak setuju	1	0%	0%	0%	0%
Tidak setuju	2	0%	0%	0%	0%
Netral	3	9%	7%	11%	20%
Setuju	4	83%	82%	72%	67%
Sangat setuju	5	8%	11%	17%	13%
Jumlah		100 %	100 %	100 %	100 %
Mean Skor Indikator		3.99	4.86	4.06	3.93
Mean Skor Variabel		4.21			

1.2 Variabel akuntabilitas (X₂)

Dalam mendeskripsikan variabel akuntabilitas maka dapat dilihat pada frekuensi hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan atau indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pada pemerintahan desa Sinar Baru dan Purba Sinombah kecamatan Silimakuta.

Tanggapan	Skor	X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}
Sangat tidak setuju	1	0%	0%	0%	0%
Tidak setuju	2	0%	0%	0%	0%
Netral	3	23%	8%	17%	13%
Setuju	4	70%	87%	75%	72%
Sangat setuju	5	7%	5%	8%	15%
Jumlah		100 %	100 %	100 %	100 %
Mean Skor Indikator		3.84	3.97	3.16	4.02
Mean Skor Variabel		3.75			

1.3 Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa(Y)

Deskripsi terhadap kepuasan pelanggan dapat dilihat pada frekuensi hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan atau indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa Sinar Baru dan Purba Sinombah kecamatan Silimakuta. Kinerja pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa Sinar Baru dan Purba Sinombah kecamatan Silimakuta (Y) diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas.

Tanggapan	Skor	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6
Sangat tidak setuju	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tidak setuju	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Netral	3	8%	18%	17%	10%	27%	13%
Setuju	4	75%	70%	70%	68%	56%	75%
Sangat setuju	5	17%	12%	13%	22%	17%	12%
Jumlah		100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Mean Skor Indikator		4.09	3.94	3.96	4.12	3.9	3.99
Mean Skor Variabel		4.0					

1.4. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi (r-hitung)	r-tabel	Validitas	Alpha Cronbach (Reliabilitas)
Good Governance (X)	X1.1	0.482	0.25	Valid	0.648
	X1.2	0.382	0.25	Valid	
	X1.3	0.461	0.25	Valid	
	X1.4	0.719	0.25	Valid	
	X2.1	0.467	0.25	Valid	0.635
	X2.2	0.396	0.25	Valid	
	X2.3	0.505	0.25	Valid	
	X2.4	0.647	0.25	Valid	
Kinerja Pengelolaan Keuangan	Y.1	0.587	0.25	Valid	0.752
	Y.2	0.663	0.25	Valid	
	Y.3	0.674	0.25	Valid	
	Y.4	0.745	0.25	Valid	

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi (r-hitung)	r-tabel	Validitas	Alpha Cronbach (Reliabilitas)
Desa (Y)	Y.5	0.628	0.25	Valid	
	Y.6	0.481	0.25	Valid	

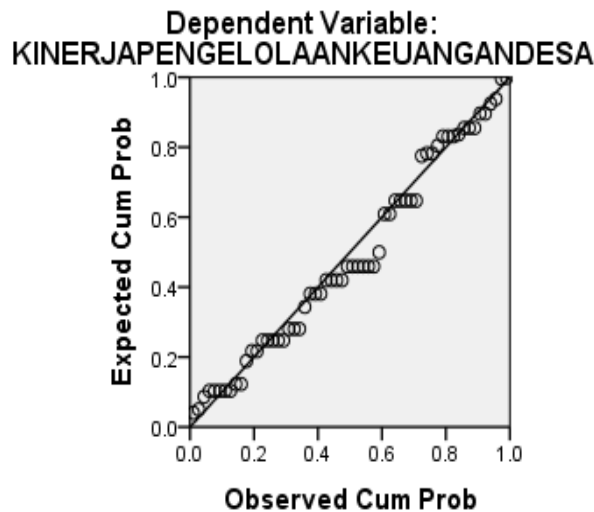
Sumber : Data diolah SPSS v. 22

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) seluruh pernyataan lebih besar dari r_{tabel} (0.254) maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid.

Demikian pula terhadap nilai *Cronbach-Alpha* dari masing-masing variabel menunjukkan angka lebih besar dari 0.60 sehingga dapat dikatakan instrument penelitian adalah reliabel.

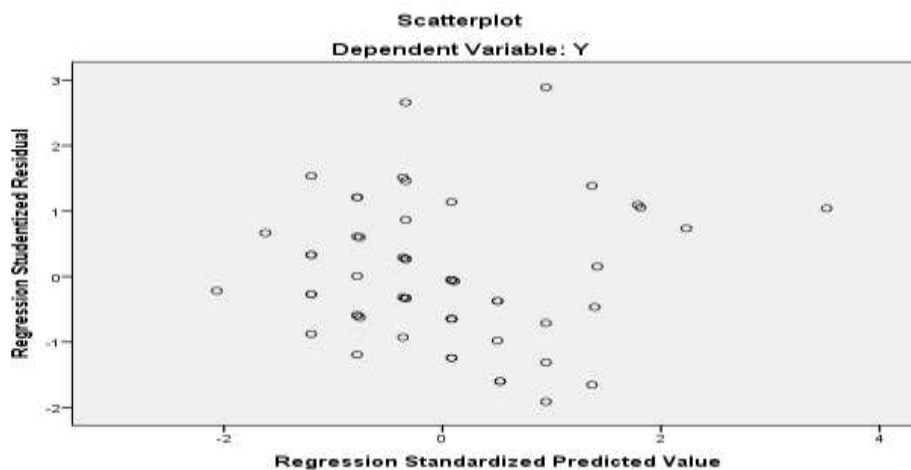
2. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dari gambar grafik diatas menunjukkan pola grafik yang normal, terlihat dari titik distribusi data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Artinya data berdistribusi normal dan asumsi kenormalan terpenuhi.

3. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah SPSS v. 22

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai-nilai residunya menyebar dibawah angka 0 pada sumbu Y, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.064	4.784		.432	.668		
X1	1.100	.215	.538	5.106	.002	.997	1.114
X2	.534	.223	.252	2.394	.020	.866	1.004

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah SPSS v. 22

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai VIF dari variabel *good governance* dan kinerja pengelolaan keuangan desa lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$), berarti tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Sedangkan nilai tolerance dari variabel *good governance* dan kinerja pengelolaan keuangan desa lebih besar dari 0.10 (Nilai tolerance $> 0,10$), berarti tidak terdapat multikolinoeritas antar variabel independen.

5. Analisis linear berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.064	4.784		.432	.668
X1	1.100	.215	.538	5.106	.002
X2	.534	.223	.252	2.394	.020

Sumber : Data diolah SPSS v. 22

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas kolom *Unstandardized Coefficients* bagian B diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 2.064 + 1.100 X_1 + 0.534 X_2 + e$$

Pada persamaan regresi tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Konstanta (a) = 2.064 ini mempunyai arti bahwa apabila variabel transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2) adalah nol. Hal ini akan menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan desa akan positif, jika tidak terdapat variabel *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas.
- Koefisien (b_1) = 1.100 pengaruh variabel transparansi (X_1) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y) didapatkan koefisien regresi sebesar 1.100 mempunyai arti bahwa jika terjadi kenaikan variabel transparansi (X_1) sebesar 1 satuan, maka nilai kinerja keuangan desa (Y) akan meningkatkan sebesar 1.100.
- Koefisien (b_2) = 0.534 pengaruh variabel akuntabilitas (X_2) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y) didapatkan koefisien regresi sebesar 0.534 mempunyai arti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel akuntabilitas (X_2) sebesar 1 satuan, maka nilai kinerja pengelolaan keuangan desa (Y) akan meningkatkan sebesar 0.534.

6. Koefisien Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df 1	df2	Sig. F Change	
1	.808 ^a	.639	.347	1.69296	.639	16.680	2	57	.000	1.765

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS v. 22

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai $R = 0.808$ yang berarti bahwa hubungan antara variabel bebas (X_1 dan X_2) secara serentak dengan variabel terikat (Y) dalam kategori sangat kuat.

7. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df 1	df2	Sig. F Change	
1	.808 ^a	.639	.347	1.69296	.639	16.680	2	57	.000	1.765

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS v. 22

Berdasarkan tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai R Square = 0.639 menunjukkan bahwa variabel kinerja pengelolaan keuangan desa (Y) dapat dijelaskan oleh transparansi dan akuntabilitas sebesar 63,9%, sedangkan sisanya sebesar 36,1% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

8. Uji Simultan (Uji- F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	95.615	2	47.808	16.680	.000 ^b
	Residual	163.368	57	2.866		
	Total	258.983	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Data diolah SPSS v. 22

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan nilai F_{hitung} adalah 16.680 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan F_{tabel} adalah 3.156. oleh karena pada kedua perhitungan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($16.680 > 3.156$) dan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berupa variabel transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat kinerja pengelolaan keuangan desa (Y).

9. Uji Parsial (Uji- t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.064	4.784		432	.668
X1	1.100	.215	.538	5.106	.002
X2	.534	.223	.252	2.394	.020

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS v. 22

Berdasarkan tabel 4.16 di atas memperlihatkan nilai t_{hitung} Variabel transparansi (X_1) adalah $5.106 > T_{tabel} = 1.672$ dan nilai signifikansi adalah 0.002, nilai ini lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Hal ini berarti transparansi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y).

Nilai t_{hitung} variabel akuntabilitas (X_2) adalah $2.394 > T_{tabel} = 1.672$ maka nilai signifikansi adalah 0.020, nilai ini lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Hal ini berarti akuntabilitas (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Nilai t_{hitung} Variabel transparansi (X_1) adalah $5.106 > T_{tabel} = 1.672$ dan nilai signifikansi adalah 0.002, nilai ini lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Dari hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel transparansi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa Sinar Baru dan Purba Sinombah Kecamatan Silimakuta artinya jika diterapkannya prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan dan akan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah desa sehingga kontrol masyarakat terhadap pemerintah desa akan berjalan efektif dan kinerja pengelolaan keuangan desa akan meningkat menjadi lebih baik jika indikator prinsip transparansi sudah terlaksana atau diterapkan dengan baik juga.
2. Nilai t_{hitung} variabel akuntabilitas (X_2) adalah $2.394 > T_{tabel} = 1.672$ dan nilai signifikansi adalah 0.020, nilai ini lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Dari hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa Sinar Baru dan Purba Sinombah Kecamatan Silimakuta artinya jika diterapkannya prinsip akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa, kinerja pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kepatuhan pemerintah desa kepada masyarakat melalui laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat, maka Kinerja pengelolaan keuangan desa akan meningkat menjadi lebih baik jika indikator-indikator prinsip transparansi sudah terlaksana dengan baik juga. Pemerintah desa Sinar baru dan Purba Sinombah sudah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi setiap tahun anggaran kepada pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan anggaran.
3. Dari hasil perhitungan Uji F (simultan) menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *good governance* yang terdiri dari transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa Sinar Baru dan Purba Sinombah Kecamatan Silimakuta.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan saran sebagai berikut:



1. Pemerintah desa Sinar Baru dan Purba Sinombah sebaiknya melakukan musyawarah kembali setelah kegiatan atau program desa yang dilaksanakan selesai agar masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan anggaran dan pemerintah desa bisa menampung segala usulan atau masukan dari masyarakat.
2. Pemerintah desa Sinar Baru dan Purba Sinombah diharapkan pada setiap program, kegiatan ataupun pengelolaan keuangan desa dapat memperhatikan segala aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas agar pengelolaan keuangan desa di kelola dan di manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Edisi Pertama BPFE
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance Pemerintahan yang Baik. Bagian Kedua Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.